



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Pulau Dompok - Tanjungpinang
Telp. (0771) 457 6000 (Hunting) Fax. (0771) 457 6092
Pos-el: sekretariat.dprd@kepriprov.go.id Laman: <http://dprd-kepriprov.go.id>

RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Jenis Rapat : Panitia Khusus Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
2. Hari/Tanggal Rapat : Kamis / 13 Juni 2025
3. Waktu Mulai/Selesai : 09.00 WIB s.d. Selesai
4. Tempat : Ruang Rapat Graha Kepri Lt. V, Batam
5. Sifat Rapat : Terbuka
6. Acara / Materi Rapat : Rapat Pembahasan RPJMD Bersama OPD
7. Pimpinan Rapat
Ketua : H. Teddy Jun Askara, S.E., MM
Wakil Ketua : Ir. Onward Siahaan, S.H., M. Hum
Wakil Ketua : Hanafi Ekra, S. Ag., M. Pd. I

8. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Terhadap Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Iman Sutiawan	Penanggung Jawab Pansus	F. Gerindra
2.	Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd	Koordinator Pansus	F. Golkar
3.	dr. T. Afrizal Dachlan, M.M	Koordinator Pansus	F. Nasdem
4.	H. Bahktiar, M.A	Koordinator Pansus	F. PKS
5.	H. Teddy Jun Askara, SE., MM	Ketua Pansus	Fraksi Golkar
6.	Ir. Onward Siahaan, SH., M. Hum	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Nasdem
7.	Hanafi Ekra, S. Ag., M. Pd. I	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Pks
8.	Marzuki, S.H	Anggota	Fraksi Gerindra
9.	Andi S. Mukhtar, S.T	Anggota	Fraksi Gerindra
10.	Muhammad Najib	Anggota	Fraksi Gerindra
11.	H. Zainal Abidin, S.E., M.M	Anggota	Fraksi Golkar
12.	Agustian	Anggota	Fraksi Golkar
13.	dr. H. Jusrizal	Anggota	Fraksi Nasdem
14.	H. Suhadi, S.T	Anggota	Fraksi Nasdem
15.	H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M	Anggota	Fraksi Pks
16.	Januar Robert Silalahi, S.I.Kom	Anggota	Fraksi Pdi-Perjuangan

17.	Harlianto, S. Kom., M.M	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Indonesia
18.	Tumpal Ari Mangasi Pasaribu, S.E	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Indonesia
19.	Aman, S.Pd., M.M	Anggota	Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa
20.	Ika Hasillah, M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

9. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Terhadap Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	DRA. HJ. Dewi Kumalasari, M. PD	Penanggung Jawab Pansus	F. Golkar
2.	Teddy Jun Askara, SE, MM	Ketua Pansus	Fraksi Golkar
3.	IR. Onward Siahaan, SH, M.HUM	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Nasdem
4.	Hanafi Ekra, S. AG, M.PD.I	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Pks
5.	Agustian	Anggota	Fraksi Golkar
6.	dr. H. Jusrizal	Anggota	Fraksi Nasdem
7.	H. Suhadi, ST	Anggota	Fraksi Nasdem
8.	Januar Robert Silalahi, S. I. Kom	Anggota	Fraksi Pdi-Perjuangan
9.	Harlianto, S. KOM, MM	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Indonesia
10.	Aman, S. Pd., MM	Anggota	Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa
11.	Tumpal Ari Mangasi Pasaribu, SE	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Indonesia

10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Aries. F	Ka. Bappeda	
2.	Abdullah	Ka. Bapenda	
3.	Said	Ka. Dkp Kepri	
4.	Junaidi	Kadishub	
5.	Peri. G	Sekretaris Dishub	
6.	Diana Novianti	Kabag Puu Biro Hukum	
7.	Didit Yulianto	Ka. Upt Karimun	

8.	Eka Kodya	Ksb Bapenda	
9.	Masnem	Bapenda	
10.	Deny Yanto. S	Kasi Operasional	
11.	Henny Andriani	Bapenda	
12.	Rio Adam	Bapenda	
13.	Patrick	Ka. Upt Btc	
14.	Joko Rianto	Ka. Upt Tg. Baru	
15.	Raulis	Dishub	
16.	David Prengky	Ka. Upt Batu Aji	
17.	Yuri Aditya	Ka. Bintan	

11. Jalannya Rapat

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Assalamualaikum wb. wb, Selamat pagi. Salam sehat, sejahtera bagi kita semua, kita masuk dengan paparan, kita langsung dengan Bapenda untuk memaparkannya.

Abdullah

----- materi terlampir -----

H. Suhadi, S.T

Kajian pertumbuhan PAD dasar hukum. RPJMD kita ini minta di perbaiki, rekomendasi PAD minimal 5% pertahun di atas inflasi, ada amanat undang-undang, belanja rutin wajib dikeluarkan, belanja operasional RPJMD itu menghabiskan belanja modal menurut kementrian.

Teddy Jun Askara, SH., M.M

Nanti kita masuk dalam program ke OPD yang bersangkutan.

Aman, S.Pd., M.M

Assalamualaikum wb. wr, bahwa yang di sampaikan pak Suhadi materi yang di sampaikan itu sangat baik. Dari buku besar ada perbedaaan untuk PAD kita, ini kita harus pastikan dulu karena kita ingin bantu pemerintah dari pemerintah. Kita bahas dengan bahan yang baik, jadi dari titik itu di tahun ini sangat jomblang dari pendapatan pajak kendaraan kita, pertumbuhan kita di Kepri ini dan saya lihat dari yang progresif, semua OPD berkerja keras jadi kita minta bisa lebih maju dari Batam, sampai karena ini belum di bahas karena ini baru pendapatan.

Ir. Onward Siahaan, SH., M. Hum

Kami dari pandangan fraksi kemarin ada perbedaan yang tidak sesuai dengan ekspetasi, saya lihat dari Bapenda padahal kami harapkan ini bisa tercapai dan data dari mana bapak bicara dan mana data yang ada.

Teddy Jun Askara, SH., M.M

Jadi pak Abdullah ini baru permulaan ada lagi draf, UPT yang mencari duitnya kita tidak punya data, kita minta ada inovasi, kita ada buat kerja sama kejaksaan, kerja sama juga dengan Pertamina kendaraan yang belum 2 tahun jangan di keluarkan kartu Pertamina.

Harlianto, S. Kom., MM

Terkait dengan pembangunan, tentu terkait dengan pembangunan nasional ini selaraskan. Apapun yang kita kejar tentu beberapa hal kita juga melalui labuh jangkar, kita fokus pada pendapatan.

Teddy Jun Askara, SH., M.M

Gambaran pajak pertambangan yang sudah produksi dan ada.

Abdullah

Data 2025, dari data pajak kendaraan bermotor.

Ir. Onward Siahaan, SH., M. Hum

Itu data sudah tertarik apa belum tarik ada data yang di Polda.

Harlianto, S. Kom., M.M

Jadi berapa yang terhutang?

Abdullah

Tentang adanya penurunan ini kebijakan pemerintah pusat. Dengan adanya dana insentif, penerima ini kami kira surat edaran ini belum ada, upaya kami 2025 ini ada program pemutihan, mencoba mendatangi ke perusahaan, untuk pajak ini kami terima dari Kabupaten/Kota, kami ada juga rapat dengan Dinas Pertambangan apakah ini bisa di tambah lagi dan kami ingin ini mencapai, dan juga dari pendapatan dari bahan bakar juga.

Aman, S.Pd., M.M

Kita sama data dari Polda kita bisa cari, PPS itu merenda penerima tahun 2026 tidak masuk pertimbangan hanya pengurangan, tidak masuk pertumbuhan dari pusat dengan daerah.

Erawanto

Data tadi terkait 2025 data kendaraan bermotor di tahun 2026 ada opsi kita langsung ke Kabupaten/Kota ada pengurangan di bulan Desember dan 2026 kita dikaitkan dengan angka yang sama ada penurunan yang terbesar itu kendaraan roda 4 ada juga tunggakan itu ada di roda 2 Dari 10% di minta 2% itu di minta patrol.

Ir. Onward Siahaan, SH., M. Hum

Berapa data dari bapenda dari Polda, karena Gubernur itu ada visi dan misi, apa kendala di lapangan?

Aman, S.Pd., M.M

Jadi kalau ada basis data sudah ada, jadi waktu pembelian pertama itu bayar pajak.

Harlianto, S. Kom., M.M

Setia warga itu bayar pajak.

H. Suhadi, S.T

Kita di komisi 2 ini sudah membahas pendapatan.

Ria

Yang di masuk....ada 3 Samsat kepolisian dan kejaksaan.

H. Suhadi, S.T

-----materi terlampir)-----

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Komunikasi dari Samsat Kepolisian dan Jasaraharja nya, jadi nanti kita dengar juga dari Kepala UPT.

Patrick Dishub

Kami dari UPT dari penagihan itu kami turun ke perusahaan banyak yang tidak bayar pajak jadi kalau bisa rubah alur pembayaran ada perusahaan bagian perusahaan transportasi itu banyak tidak bayar untuk melakukan razia kami sudah rapat dengan kejaksaan dengan rencana yang buat pemutihan dan dari data penjualan (data) dari bapak-bapak dewan ada dapat masukan.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Jadi nanti kita sambung pada jam 2 nanti, jadi kita bisa bahas rapat yang berikutnya baik terima kasih, rapat saya tutup.

Rapat kita buka kembali baik kita mulai paparan nya dari dishub.

Patrick Dishub

Dari siang ini kita komplit dan sudah kami dengar tadi kegiatan yang ada di dinas perhubungan dari realisasi yang sesuai pada tahun 2024 ada koreksi, kami ada beberapa pelabuhan bongkar muat setelah kita lihat dari tahun 2024 realisasi target dan capaian, pada tahun 2024 dari 2025 itu ada barang-barang proyek misal nya semen dll, itu salah satu pelayanan pelabuhan yang bersandar ada empat lima kapal dan ada juga yang kosong dan ada juga kapal ro-ro dan mudah-mudahan pada tahun 2026 itu ada capaian, ada juga labuh jangkar kami sepakat ini salah satu pendapatan aset kita tapi secara bisnis ini sudah dilaksanakan, tapi secara pendapatan kita belum dapat, untuk pelayanan ada di Karimun Natuna dan Lingga, itu akan aktif (angka meteri).

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Saya bertanya sedikit di pelabuhan kita pernah berkunjung di Sei Tenam itu sangat minim sekali, dan saya bisa lihat dari tiket karcis itu sejenis di fotokopi, kalau itu bisa di manipulasi itu bisa pendapatan kita bisa minim, jadi kalau bisa kita pikirkan itu bisa ada nya pungli, tambang-tambang itu bagaimana, labuh jangkarnya?

Patrick Dishub

Baik itu karcis itu ada di Sei Tenam itu semua ada di kita itu bisa di copy, dan itu jika ada temuan pungli kita sudah ada fakta integritas, dan selama ini kita belum temukan dan karcis itu ada penghitungan bersama BKD, ada pemungutan dari Kementerian.

Tumpal Ari Mangasi Pasaribu, S.E

Untk UPT wilayah Batam retribusi ini, dan apa langkah yang kita lakukan?

Patrick Dishub

Kita duduk di Batam, di Batam ada 16 item yang di pungut, hari ini kita ada pemanfaatan, pelabuhan Sijantung itu hanya di gunakan itu antar pulau, itu kecil dan jarak kota nya itu jauh, ada dari bp Batam dan kota Batam itu maksimal, kalau Dishub itu pelabuhan saja, kalau ada dari Kementerian, kalau dari hasil untuk sama dengan BP Batam itu tidak bisa, jadi kalau tidak ada halangan koperasi itu mungkin bisa, jadi aturan Pergub.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Izin pelabuhan itu dari siapa?

Patrick Dishub

Kalau yang di pelabuhan Sei Jang, ada di Bintan itu kita izinkan dan itu bisa mendongkrak itu sudah jalan di bintan 2025.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Kalau ada di tanyakan lagi, baik terima kasih pak Dishub, dan nanti kita akan panggil lagi. Kita langsung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memaparkannya.

John Disnaker

Kemarin kami sudah menyampaikan ini juga di komisi II, izin kami menyampaikan dari disnaker, ini target 1 juli 2024 terdapat perubahan singnifikasi dalam system pengajuan perpanjangan (materi terlampir).

Maka dari itu dari pendaftaran baru itu, dari intan itu sekitar 20 miliar kalau batam itu sekitar 40 miliar.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Bagus nya itu di pusat saja.

Aman, S.Pd., M.M

Tadi masih dapat retribusi itu bisa dapat lagi, dan itu dapat dari mana saja?

John Disnaker

Terkait ketetapan ini, ini hanya difen saja dengan upaya yang lain tidak bisa, dan ini hanya di kabupaten kota saja, jadi kalau pendaftaran baru itu kalau bisa provinsi itu bisa dapat juga, dan presentasi itu, angka nya saja itu tidak dapat.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Kita punya BLK, kalau kita bentuk itu ada di beberapa daerah dan itu bisa pendapatan baru tapi itu pada tahun 2026-2027, itu bisa kita gunakan TA kita. Kita langsung dengan Dinas Kelautan untuk memaparkannya.

Said Dinas Kelautan

----- meteri terlampir -----

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Berarti ini sudah di ambil semua, kalau kita ambil bibit ikan itu di tempat orang, jadi kalau bisa kita lakukan pembibitan itu kalau di kumpulkan sudah lumayan dan masuk kedalam pendapatan, dan kalau kita bisa kita katakan ke anggota di pusat, meletakkan Pabrik es itu sangat jauh.

Aman, S.Pd., M.M

Saya pikir harus ada trobosan yang baru sedangkan kita berputar pada itu saja, dan itu sudah di tarik pusat semua, dan pada sektor sektor pendapatan yang kita dapat, ini tugas kita ke Kementrian, dan bapak bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa, jadi itu kalau bisa kita buat trobosan baru di Kepri, karena basis kita ini harus ke Kementrian, dan pendapatan ini harus balik lagi ke kita.

Ir. Onward Siahaan, SH., M. Hum

Saya rasa ini momen yang, dan kalau bisa ini kita gunakan ini, tapi untuk membangun Kepri ini butuh sekian, karena apa apa ini sudah ke Pusat, jadi kalau tergantung kepada kendaraan kita tidak mampu untuk menaikan Pembangunan ini, itu sekarang ini masih satu dijit jadi kalau bisa dengan angka agak, jadi sekarang ini kita harus bicara, kita bisa datangi ke Pusat.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Potensi 2025-2030 itu tidak bisa targetkan, kami tidak bisa itu kosong, kalau itu di realisasikan itu bisa ajukan, kalau tidak bisa itu kita tutup saja, jadi kedepannya di pikir oleh DKP, jadi kalau kosong, jadi Inovasi- inovasi yang ada di batam hanya cabang saja..

Harlianto, S. Kom., M.M

-----materi terlampir-----

Said Dinas Kelautan

Jadi itu semua di nalkan oleh Kementrian.

Harlianto, S. Kom., M.M

Jadi kalau bisa kita ke Kemntrian terkait Regulasi pendapatan, dan aturan regulasi, sebetul nya kalau ada ke Kementrian karena ini potensi yang sangat baik, jadi saya usulkan Pansus pendapatan.

H. Suhadi, S.T

Kita ada bertemu beberapa kali, target kita ini program kinerja kita, atau juga kita buat Pansus, dan sudah masuk RPJMD dan masuk di pendapatan kita, dan ini hurus Pansus.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Nanti kita usulkan sama sama ke ketua, jadi cukup ya paparan nya untuk kedepannya terhadap OPD yang Bapak pimpin.

Kita lanjut dengan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud untuk memaparkannya.

Asep RS Jiwa

Kita sudah alokasi anggaran prasarana itu sudah lengkap, untuk realisasi anggran,

----- meteri terlampir -----

Kalau bisa Jamkesmas itu bisa juga ada, sementara itu kita beri layanan, kita juga sudah beri juga ke sekolah, itu juga ada maslah pada remaja.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Jadi ini pendapatan dari JKO, ini perhitungan dari, jadi ini kemampuan nya dari.

Aman, S.Pd., M.M

Jadi kalau 2% itu jadi kalau bisa ini jangan kira kira saja, dari tahun 2023-2024 kalau bisa kenaikannya hanya 10%, jadi apa yang bisa kita dorong dan apa yang kita lakukan dan paling tidak apa yang bisa naik, jangan hanya paska pilk itu, dan jangan ada timbul masalh dan asumsi yang jelas.

Hanafi Ekra, S. AG, M.PD.I

Kalau dia satu-satunya RS jiwa.

Aman, S.Pd., M.M

Jadi ada komplin jadi tidak ada tempat lagi, saya ingin bagaimana kita bisa mantap lagi dengan masyarakat.

Harlianto, S. Kom., MM

Tahun 2020 ada 102 umum itu layanan kamar kita itu ada berapa, dan tahun 2025 total, berimbang tidak dengan proyeksi itu sangat mini sekali JKO itu dan umum, karena kita pelayana, kita kurang di marketing nya, khusus nya di batam itu di setiap perusahaan itu sangat bagus, jadi ini PR kita, jadi ke dapan nya rencana bagai mana, ini bagian dari marketingmkita lemah, target dan indek kita kedepan nya maju, jadi kita pelajari.

Aman, S.Pd., M.M

Ini kita angkat dulu potensi.

Joko RS Jiwa

Ini 5%, setelah kami amati itu ada. Jadi kami ada jemput bola itu sekitar 700 ribu itu hanya 8 orang, dan untuk yang di Batam itu harus seberang lewat laut, jadi kalau bisa saya pinjam kapal Kepri, dan ada aplikasi itu yang kita pakai, tetapi itu prabayar, beda kesehatan jiwa itu beda dengan mental, kalau mental itu tinggal kita saja yang menghadapinya, salah satu itu yang perorangan hanya satu satu, kalau ada yang dengan sadar, dan orang itu tidak pernah penuh.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Itu kita bicara di Komisi saja.

H. Suhadi, S.T

Jadi ada yang di Batam, ingin berobat itu sangat jauh.

Aman, S.Pd., M.M

Itu pendapatan nya dari 2030 itu berapa akhir dari RPJMD?

Joko RS Jiwa

(materi terlampir)

Teddy Jun Askara, S.H., M.M.

Kita lanjut dengan RSUP Raja Ahmad Tabib untuk memaparkannya.

Bambang RSUP Ahmad Tabib

Jadi kami ada terhutang dari BPJS, target pendapatan,

----- meteri terlampir -----

Aman, S.Pd., M.M

Apa ada lagi tambahan, tadi 95 dari 132 itu.

Bambang RSUP Ahmad Tabib

Kita bisa minta naikan di ambang batas, itu tidak bisa.

Aman, S.Pd., M.M

Jadi kalau prestasi itu bagus.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Baik nanti bapak hitung ulang dan nanti kasih ke kita.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Assalamualaikum wr wb., selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, kira masuk dengan paparan, kita langsung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memaparkannya.

Venni BPKD

----- materi terlampir -----

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Terima kasih atas paparan nya, silahkan pak Suhadi.

H. Suhadi, S.T

Jadi terima kasih apresiasinya untuk Asrama Haji itu bisa di perbaiki, jadi harga jualnya bisa di naik, kalau tahun depan kita bisa kita anggarkan.

Aman, S.Pd., M.M

Mungkin jadi khusus kita karena belum ada jasa giro, kalau deposito itu mungkin itu lebih tinggi, saya hanya bisa itu hanya alternatif saja, maka fasilitasnya harus di tingkatkan, kita tidak perlu banyak bahas.

Harlianto, S. Kom., MM

Terkait pernyataan modal itu kedepannya ada.

Venni BPKD

Itu ada rencana penambahan modal, itu sudah di sampaikan tapi belum angkanya.

Harlianto, S. Kom., MM

Kalau defiden itu pendapatan, agak bingung angka nya.

Venni BPKD

Jadi APBD murni 4 miliar, angka defiden itu sudah masuk, di APBD itu sudah terima, kalau setelah terima targetnya sudah ada, jadi terkait pak Gubernur itu

ada penambahan, jadi kalau untuk deposito itu sudah kita lakukan, jadi kalau uang itu, ada dua bank itu ada 6%.

Harlianto, S. Kom., MM

Terkait dari deposito itu sampai P itu berapa?

Venni BPKD

6,2% sekitar 200 juta.

Harlianto, S. Kom., MM

Terakhir saya lihat itu Asrama Haji itu kalau bisa harus ada penambahan lagi.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Aset, punya pendataan barang yang kita punya untuk bisa di lelang untuk masukan kita.

Venni BPKD

Kita sudah ada pelelangan ke KPK.

Teddy Jun Askara, SH., M.M.

Baik, terima kasih atas paparannya.

12. PENUTUP

Demikianlah Risalah Rapat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISEPAKATI BERSAMA OLEH:
PANITIA KHUSUS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA PANSUS,



H. TEDDY JUN ASKARA, S.E., M.M.

WAKIL KETUA PANSUS,



Ir. ONWARD SIAHAAN, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PANSUS,



HANAFI EKRA, S.Ag., M.Pd.I.